

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR***THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS ANALYSIS OF SOURCE OF REVENUE OF GENUINESS AREA (PAD) AT LOCAL GOVERNMENT OF SUB-PROVINCE OF CIANJUR.*****A.B. Setiawan, E. Surtini**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155
Email : ade.budi.setiawan@unida.ac.id, eneng.surtini43@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine how much the effectiveness source of the local government income and the contribution of revenue collection at Regional Income of Cianjur Regency, especially in the Regency of Cianjur in increasing source of local government income. The unit of analysis was the Report of Income and Expenditure Budget Calculation period 2012 – 2014. The method in this research is using descriptive methods, with effectiveness analysis and contribution analysis as the instrument of the analysis. The results of this research conducted shows that the average of the effectiveness of the Local Tax is 107,31 percent (very effective), Local Retribution is 105,49 percent (very effective), Local Wealth Management is 95,54 percent (quite effective), and Other Legitimate Income is 112,51 percent (very effective). Level of contribution of source of local government income in period 2012 – 2014 start at 0,30 percent until 10,13 percent and the result is very quite and quite.

Key word: *Effectiveness, Contribution, Source of Income, Local Revenue, Local Government of Cianjur Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah sebesar 107,31 persen (sangat efektif), Retribusi Daerah sebesar 105,49 persen (sangat efektif), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 95,54 persen (cukup efektif), dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 112,51 persen (sangat efektif). Tingkat kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2014 adalah berkisar antara 0,30 persen sampai dengan 10,13 persen dan menunjukkan hasil sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Sumber-sumber PAD, Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang relevan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam mengelola perekonomiannya. Terlebih diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001, mengharuskan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal serupa juga ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mencari sumber pendapatannya sendiri. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengelolaan dan pencarian tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2010 tentang pemerintahan Daerah, dimana daerah dapat mengurus rumah tangga dan kebutuhannya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka

kepadanya diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber kekayaan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa peran pemerintah daerah sangat besar dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerahnya, sehingga berusaha untuk menggali sendiri sumber-sumber pendapatan daerahnya.

Pendapatan Daerah dapat bersumber dari pusat dan daerah, menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari (1) Pendaptan Asli Daerah seperti, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan yang signifikan bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Adawiyah, 2012).

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada kemampuan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayahnya. Peningkatan potensi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin mandiri tingkat keuangan daerah tersebut, serta semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerahnya.

Sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah berasal dari daerah itu sendiri, menurut Siahaan (2005:15) bahwa dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu

sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing. Sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Disamping itu, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah dan bentuk lain akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pemberian wewenang dalam menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah (PAD) yang sah, karena menurut Halim (2004: 22) peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kabupaten Cianjur, sebagai daerah otonom yang berada di wilayah Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian dan wisata. Kabupaten Cianjur dalam kegiatan pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian, menurut data Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur yaitu pada sektor pertanian sekitar 62,99%. Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu sekitar 14,60%. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swa sembada padi, dimana setiap tahunnya daerah Kabupaten Cianjur bisa memproduksi sekitar 625.000 ton padi (www.cianjurkab.go.id).

Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Cianjur juga berpotensi besar dalam perkembangan pariwisatanya. Hal ini terlihat dari banyaknya potensi tempat wisata yang bisa ditemui di Kabupaten Cianjur seperti Gunung Gede Pangrango, Pantai Jayanti yang membentang sejauh 75 KM di wilayah Cianjur Selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Perkebunan, dan Peternakan. Melalui potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas terkait melakukan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, seharusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan. Berikut adalah perkembangan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2014.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Presentase (%)
2012	185.972.763.885,60	215.802.558.713,00	29.829.794.827,40	116,04
2013	250.403.562.868,00	266.100.616.612,20	15.697.053.744,20	106,27
2014	385.119.931.061,60	411.538.567.542,95	26.418.636.481,35	106,86

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 1. diketahui adanya perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Hal ini terlihat dari adanya penurunan presentase realisasi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tahun 2012 - 2013 dengan tingkat

penurunan sebesar 9,77%, kemudian jumlahnya meningkat sebesar 0,59% di Tahun 2014 menjadi 106,86%. Melalui penjelasan tersebut terlihat bahwa Kabupaten Cianjur memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, hal ini dikarenakan selama tiga tahun terakhir jumlah Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur walaupun mengalami penurunan akan tetapi mampu melebihi jumlah target yang telah ditetapkan.

Terealisasinya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Halim (2002: 34) ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahunnya, tidak menjamin bahwa Kabupaten Cianjur mampu membiayai kebutuhannya sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya ketidak seimbangan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran maupun belanja daerah. Data dibawah ini, menunjukkan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan sumber pendapatan selama tahun anggaran 2012-2014:

Tabel 2. Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Thn	Sumber Pendapatan						Jumlah (Rp)
	PAD (Rp)	%	Dana Perimbangan (Rp)	%	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah (Rp)	%	
2012	215.802.558.713	10,60	1.430.477.371.436	70,27	389.250.931.165	19,12	2.035.530.861.314
2013	266.100.616.612	11,84	1.522.548.238.940	67,73	459.210.392.793	20,43	2.247.859.248.345
2014	411.538.567.542	15,66	1.595.594.389.746	60,71	621.200.936.817	23,63	2.628.333.894.105

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 2. diatas menunjukkan bahwa dalam perolehan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur didominasi oleh Dana Perimbangan dengan rata-rata 66,27% pertahun, kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata 21,1% pertahun dan kontribusi terkecil bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perolehan rata-rata 12,7% pertahun. Sementara, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun apabila dilihat dari kontribusinya, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur masih relatif kecil yaitu dibawah 20 % setiap tahunnya.

Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya bisa menyerap sumber-sumber penerimaan daerah. Kurangnya penyerapan ini ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur menduduki posisi terakhir dalam rangka membiayai kebutuhannya, dan masih tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan, menurut Kaho (1997: 252),

penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya juga dapat dijadikan tolak ukur kemandirian daerah. Apabila dilihat dari potensi-potensi yang ada, Kabupaten Cianjur masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar Kabupaten Cianjur dapat meyerap dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terlihat tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cianjur.

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan

cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Ulum, 2004: 2).

Akuntansi sektor publik terdiri dari dua kata yaitu akuntansi dan sektor publik. Akuntansi menurut Suwardjono (2005: 5) merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perikayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan sektor publik menurut Mardiasmo (2002: 2) yaitu suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Bastian, 2001: 5-6).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002: 14) akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan teknik pelaporan informasi akuntansi yang dipakai untuk lembaga-lembaga publik sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada publik.

Tujuan akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2002: 14) adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban. Sedangkan, *American Accounting Association* (1970) dalam

Mardiasmo (2002: 12) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah-satu bagian dari penerimaan daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Pemendagri No. 13 Tahun 2006. Selain itu, menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Siahaan (2005: 15) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Sedangkan Halim (2007: 96)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku serta bersumber dari kekayaan dalam wilayahnya sendiri dan merupakan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, dan dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin besar fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah. Menurut Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan dan kemamuran rakyat.

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan uang-uang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemauan rakyat. Mardiasmo (2011: 12) mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dapat dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 Tahun 2001). Retribusi daerah menurut Kaho (2005: 171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Halim (2001: 34) retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang

langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Biasanya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Undang-undang No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah juga merupakan komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasinya tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontraprestasi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Riduansyah, 2003).

Kaho (2005: 24) menyebutkan bahwa retribusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapatan ditunjuk

Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari; bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal Badan Usahan Milik

Negara (BUMN), bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Halim (2007: 98) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- d. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/Investasi

Pelaksanaan pencarian sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting yaitu perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberikan jasa. Menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah sendiri yaitu turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan daerah pada umumnya bergerak dalam bidang yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi perusahaan daerah penting bagi daerah karena menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bung, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
- e. Komisi, Potongan, Atau pun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan Dan/Atau Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Oleh Daerah

Menurut Halim (2007: 98) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Penerimaan Bunga Deposito
- d. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan H. Siti Jenab No. 31, Cianjur – Jawa Barat, Telp. (0263) 261890, 273180 – Fax. (0263) 263868, Website: www.cianjurkab.go.id. Dengan unit analisis laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tujuan dapat menerapkan atau mendeskripsikan juga menginterpretasikan secara tepat variabel yang diteliti. Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013: 59). Tujuan desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang dipecahkan. Data deskriptif biasanya langsung digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Penelitian ini kurang memerlukan teoritis dan hipotesis serta dapat bekerja pada satu variabel saja (Umar, 1997: 63).

Rasio efektifitas merupakan hubungan antara realisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektifitas menunjukkan kesesuaian besarnya realisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang ada. Menurut Halim (2007: 145) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Besarnya efektivitas sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mahmudi (2011: 170) sebagai berikut: Efektifitas Pajak Daerah, Efektifitas Retribusi Daerah, Efektifitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Efektifitas lain-lain PAD yang sah. Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan oleh sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan analisa kontribusi yang digunakan terdiri dari Kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap total Pendapatan Daerah, dan Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

Tabel 3. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah		Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2012	49.087.046.674,00	58.244.642.590,00	118,66	Sangat Efektif
2013	70.195.751.342,36	72.705.571.590,00	103,58	Sangat Efektif
2014	112.592.392.373,00	112.456.708.556,00	99,88	Cukup Efektif

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 3. diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 sebesar 15,08% menjadi 103,58% dan menunjukkan hasil sangat efektif karena perolehan prosentase lebih dari 100%, dengan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 sebesar Rp. 72.705.571.590,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 70.195.751.342,36. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah kembali mengalami penurunan sebesar 3,7% menjadi 99,88% dan menunjukkan hasil cukup efektif karena menurut Mahmudi (2011: 170)

perolehan prosentase antara 90% - 99% berada dalam kategori cukup efektif, jumlah realisasi penerimaan menunjukkan Rp. 112.456.708.556,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 112.592.392.373,00. Tingkat realisasi penerimaan rata-rata Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 - 2014 mencapai Rp. 81.135.640.912,00 dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 107,31% pertahun.

2. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 - 2014

Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 - 2014.

Tabel 5. Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah		Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2012	20.798.008.049,00	20.741.977.845,00	99,73	Cukup Efektif
2013	19.505.094.143,00	20.751.790.357,00	106,39	Sangat Efektif
2014	22.560.432.455,00	24.897.822.366,00	110,36	Sangat Efektif

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh naiknya tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2012 - 2013 sebesar 6,66% menjadi 106,39% dan menunjukkan hasil sangat efektif, dimana menurut Mahmudi (2011: 170) prosentase perolehan di atas 100% dikategorikan sangat efektif. Realisasi penerimaan sebesar Rp. 20.751.790.357,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 19.505.094.143,00. Pada Tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah kembali mengalami kenaikan sebesar 3,97% menjadi 110,36% dan menunjukkan hasil

sangat efektif, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 24.897.822.366,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 22.560.432.455,00. Tingkat realisasi penerimaan rata-rata Retribusi Daerah mencapai Rp. 22.130.530.189,33, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 105,49%.

3. Analisis Efektivitas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 - 2014

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 - 2014.

Tabel 6. Tingkat Efektifitas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
-------	---------------------------------------------------	-------------------------	------------

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2012	7.013.635.742,00	6.371.177.684,00	90,84	Cukup Efektif
2013	7.190.187.520,00	7.105.630.560,00	98,82	Cukup Efektif
2014	8.248.748.956,00	7.998.748.956,00	96,97	Cukup Efektif

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 6. diketahui bahwa hasil tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Kabupaten Cianjur menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal ini dikarenakan perolehan prosentase antara 90% - 99% termasuk dalam kategori cukup efektif (Mahmudi, 2011: 170). Tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 7,98% menjadi 98,82%, dengan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 7.105.630.560,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.190.187.520,00. Kenaikan ini terjadi karena terealisasinya penerimaan dari BPR/LPK sebesar Rp. 93.799.204,00 dari target sebesar Rp, 0,00.

Pada ahun 2014 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,85% menjadi 96,97%, dengan realisasi perolehan Rp. 7.998.748.956,00 dari target yang telah ditetapkan Rp. 8.248.748.956,00.

Hal ini dikarenakan tidak terealisasinya penerimaan yang berasal dari PD.PK sebesar Rp. 250.000.000,00. Realisasi penerimaan rata-rata Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp. 7.158.519.066,67, dengan tingkat prosentase rata-rata sebesar 95,54%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Cianjur berasal dari Bank BJB dan BPR/LPK, serta PD.PK. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Cianjur yang berasal dari Bank BJB diperoleh dari deviden yang dikeluarkan oleh BJB sesuai dengan RUPS.

4. Analisis Efektivitas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

Tabel 7. Tingkat Efektifitas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun	Lain-lain PAD yang Sah		Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2012	109.074.073.420,60	130.444.760.594,00	119,59	Sangat Efektif
2013	153.512.529.862,64	165.537.624.105,20	107,83	Sangat Efektif
2014	241.718.357.277,60	266.185.287.664,95	110,12	Sangat Efektif

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 7. diketahui tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang sangat efektif dan melebihi target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2011: 170) perolehan prosentase di atas 100% termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2012 perolehan prosentase Pendapatan lain-lain PAD mencapai 119,59% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 130.444.760.594,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 109.074.073.420,60.

Pada Tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 11,76% dari tahun sebelumnya menjadi 107,83%. Jumlah realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

di Kabupaten Cianjur tahun 2013 mencapai Rp. 165.537.624.105,20 dari taraget yang telah ditetapkan sebesar Rp. 153.512.529.862,64. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.092.863.511,20 dengan prosentase kenaikan mencapai 26,9%.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar 2,29% menjadi 110,12%. Jumlah realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah tahun 2014 mencapai Rp. 266.185.287.664,95 dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 241.718.357.277,60. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang

telah dicapai tahun sebelumnya, terjadi kenaikan Rp. 100.647.663.559,75 dengan prosentase kenaikan mencapai 60,80%. Realisasi penerimaan rata-rata Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp. 187.389.224.121,38 dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 112,51%.

B. Analisis Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Analisis kontribusi digunakan untuk mengidentifikasi besarnya kontribusi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur terhadap Total

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Total Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	58.244.642.590,00	2.035.530.861.314,00	2,86	Sangat Kurang
2013	72.705.571.590,00	2.247.859.248.345,20	3,23	Sangat Kurang
2014	112.456.708.556,00	2.628.333.894.105,95	4,28	Sangat Kurang

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 4.30 diketahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang sangat kurang, dengan perolehan prosentase kurang dari 10%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Halim (2004: 163) yang menyatakan bahwa prosentase kontribusi kurang dari 10% termasuk dalam kategori kurang. Grafik di bawah ini akan menunjukkan perkembangan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Daerah di

Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Total Retribusi Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	20.741.977.845,00	2.035.530.861.314,00	1,02	Sangat Kurang
2013	20.751.790.357,00	2.247.859.248.345,20	0,92	Sangat Kurang
2014	24.897.822.366,00	2.628.333.894.105,95	0,95	Sangat Kurang

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 9. diketahui tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang sangat kurang, dengan perolehan prosentase kurang dari 10%. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012

Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Semakin tinggi tingkat prosentase yang diperoleh maka semakin besar tingkat kontribusinya. Hasil analisis ini digunakan untuk membandingkan tingkat kontribusi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dengan melihat perkembangannya dari segi besaran maupun prosentasenya.

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014
Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014
Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

merupakan tingkat kontribusi yang terbesar dibandingkan dengan tahun lainnya, dengan perolehan sebesar 1,02%. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 0,92%. Pada tahun 2014 tingkat kontribusi Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,03%.

Perkembangan tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah ditentukan oleh kontribusi sumber-sumber penerimaan Retribusi Daerah.

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

3. Analisis Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Total Pendapatan Daerah

Tabel 10. Kontribusi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Total Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	6.371.177.684,00	2.035.530.861.314,00	0,31	Sangat Kurang
2013	7.105.630.560,00	2.247.859.248.345,20	0,32	Sangat Kurang
2014	7.998.748.956,00	2.628.333.894.105,95	0,30	Sangat Kurang

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa kontribusi Pengelolaah Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Cianjur selama periode tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang sangat kurang atau dengan prosentase kurang dari 10%. Perolehan kontribusi terbesar terlihat pada tahun 2013 dengan prosentase sebesar 0,32%. Sedangkan, perolehan prosentse terkecil pada tahun 2014 dengan prosentase perolehan sebesar 0,30%. Kontribusi terbesar Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan berasal dari perusahaan milik Daerah/BUMND Bank Jabar.

4. Analisis Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 – 2014

Berikut merupakan hasil perhitungan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2012 – 2014.

Tabel 11. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Total Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	130.444.760.594,00	2.035.530.861.314,00	6,41	Sangat Kurang
2013	165.537.624.105,20	2.247.859.248.345,20	7,36	Sangat Kurang
2014	266.185.287.664,95	2.628.333.894.105,95	10,13	Kurang

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 11. diketahui bahwa kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 – 2013 menunjukkan hasil yang sangat kurang, hal ini dikarenakan menurut Halim (2004: 163) perolehan tingkat kontribusi kurang dari 10% termasuk dalam kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi Lain-lain PAD pada tahun 2012 sebesar 6,41%. Sementara itu, pada tahun 2013 kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Cianjur sebesar 7,36% atau naik sebesar 0,95% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 kontribusi Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan hasil yang kurang dengan

perolehan kontribusi sebesar 10,13%. Hal ini sesuai dengan pemaparan Halim (2004: 163) dimana perolehan prosentase kontribusi di atas 10% termasuk dalam kategori kurang. tingkat kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur selama tahun 2012 – 2014 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 0,95% menjadi 7,36%. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan kembali sebesar 2,77% menjadi 10,13%. Perkembangan tingkat kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah ditentukan oleh

kontribusi sumber-sumber penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi kontribusi Penerimaan Sumber-sumber Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 12. Kontribusi Penerimaan Sumber-sumber Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014

Jenis Pajak	2012		2013		2014	
	(%)	Kriteria	(%)	Kriteria	(%)	Kriteria
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	Sangat Kurang	0,00	Sangat Kurang	0,00	Sangat Kurang
Penerimaan Jasa Giro	0,20	Sangat Kurang	0,18	Sangat Kurang	0,25	Sangat Kurang
Penerimaan Bung Deposito	0,33	Sangat Kurang	0,56	Sangat Kurang	0,47	Sangat Kurang
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	Sangat Kurang	0,00	Sangat Kurang	0,01	Sangat Kurang
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,01	Sangat Kurang	0,02	Sangat Kurang	0,02	Sangat Kurang
Pendapatan Denda Pajak	0,00	Sangat Kurang	0,01	Sangat Kurang	0,01	Sangat Kurang
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	0,00	Sangat Kurang
Pendapatan Dari Pengambilan	0,32	Sangat Kurang	0,16	Sangat Kurang	0,12	Sangat Kurang
Pendapatan Dari BLUD	4,85	Sangat Kurang	5,08	Sangat Kurang	-	-
Penerimaan Lain-lain PAD	0,41	Sangat Kurang	1,35	Sangat Kurang	9,25	Sangat Kurang

Sumber: DPKAD Kabupaten Cianjur (Data Diolah Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 12. diketahui bahwa kontribusi sumber-sumber penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Cianjur berkisar antara 0,00% sampai dengan 9,25%. Pendapatan dari BLUD menjadi salah satu penerimaan kontribusi terbesar Lain-lain PAD yang sah, hal ini terlihat dari perolehan kontribusi mencapai 5% selama dua tahun berturut-turut. Disamping itu, terlihat bahwa Penerimaan Lain-lain PAD memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2014 dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan poin Pendapatan dari BLUD (Akbid, Akper, Dinas Kesehatan, RSUD Cianjur, RSUD Cimacan kepada Lain-lain PAD tahun 2014, sesuai dengan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Akuntansi Berbasis Akrua yang baru di terapkan tahun 2014. hasil analisis kontribusi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cianjur, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur kurang berkontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan selama tahun 2012 - 2014 perolehan tingkat kontribusi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur masih dibawah 20%.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan keuangan khususnya pada peningkatan Pendapatan Daerah, diantaranya (DPKAD Kabupaten Cianjur, 2015):

1. Optimalisasi pendaptan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi daerah.
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah.
3. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Cianjur, yaitu (DPKAD Kabupaten Cianjur, 2015):

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan instentifikasi dan ekstentifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan

- memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
 4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
 5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
 6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
 7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pembangunan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
 8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi berkaitan dengan peningkatan penerimaan berbagai alokasi dana dari pemerintah pusat maupun provinsi setiap tahunnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi.
 9. Meningkatkan kerja sama dengan KPP Pratama Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis efektivitas sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2012 – 2014 mayoritas

menunjukkan hasil yang sangat efektif, atau perolehan prosentase lebih dari 100%. Disamping itu, masih terdapat beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan hasil yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan seperti Pajak Daerah pada tahun 2014, Retribusi Daerah pada tahun 2012, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama 2012 – 2014.

2. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2012 – 2014 menunjukkan hasil yang masih kurang. Sedangkan, kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 – 2014 mayoritas menunjukkan hasil yang masih sangat kurang, serta lain-lain PAD yang sah masih menunjukkan hasil yang kurang pada tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, W dan Kusuma, I. C., 2015, **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi**, Jurnal Akunida Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, Vol. 1 No. 1, ISSN 2442-3037.
- Aji, Bayu Purnomo, dkk., 2015, **Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng**, e-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 Hal 3.
- Bastian, Indra, 2001, **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Davey, KJ., 1988, **Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga**, UI-Press, Jakarta
- Devas, Nick. al, 1987. (Peny.), **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia**, Jakarta.

- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2004, **Manajemen Keuangan daerah**, Penerbit Bunga Rumpai, Yogyakarta.
- _____, 2007, **Manajemen Keuangan daerah edisi revisi**, Unit penerbit dan percetakan YKPN, Yogyakarta.
- Hammond dan Tosun, 2009, *The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties*, Discussion Paper No. 457, Germany
- Hidayah, Siti Rahmawati, 2012, **Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode 2006-2010**, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, **Pemerintah Daerah Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laksmi, Gusti Ayu Sonia Wina dan Ni Luh Supadmi, 2014, **Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah**, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 9,2 Hal. 515 – 524 ISSN 2302-8556.
- Mahmudi, 2010, **Manajemen Keuangan Sektor Publik**, UPP STIM, YKPN, Yogyakarta
- _____, 2011, **Akuntansi Sektor Publik**, UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 2011, **Perpajakan Edisi Revisi**, Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu, 2012, **Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013**, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putra, Bobby Fandhi, dkk, 2014, **Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 10 No. 1 Hal 2.
- Renyowijoyo, Muindo, 2010, **Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba**, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2014, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta
- Riduansyah, Mohammad, 2003, **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Makara, Sosial Humaniora Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, Vol. 7. No. 2 Hal. 50.
- Siahaan, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Smith, Brian C, 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London.

- Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko, 2002, **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suwardjono, 2005, **Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan**, BPFE, Yogyakarta.
- Tshukudu, Theophilus Tebetso, 2014, ***Decentrelization as a Strategy for improving Service Delivery in the Botswana Public Service Sector***, Journal Of Public Administration And Governance, ISSN 2161-7104, Vol. 4 No. 2 Hal 41-46.
- Ulum, Ihyaul, 2004, **Akuntansi Sektor Publik** Sebuah Pengantar, UMM Press, Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> diakses terakhir 12/01/2016 21:48
- www.cianjurkab.go.id diakses terakhir 08/01/2016 20:31

